

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan penyumbang sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak memang memiliki peranan yang sangat penting karena selain sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak juga berpotensi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu sumber dana pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang selalu mengalami peningkatan tersebut diharapkan dapat membantu dalam tercapainya kemakmuran rakyatnya. Perkembangan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2013 *)	2014 *)	2015 **)
Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.758.330,90
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.489.255,50
• PDN	1.029.850,00	1.103.217,60	1.439.998,60
• PPh	506.442,80	546.180,90	679.370,10
• PPN	384.713,50	409.181,60	576.469,20
• PBB	25.304,60	23.476,20	26.689,90
• BPHTB	0	0	0
• Cukai	108.452,00	118.085,50	145.739,90
• Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	11.729,50
• PDI	47.456,60	43.648,10	49.256,90
2. Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	269.075,40

Sumber : www.bps.go.id, 2016

Keterangan :

*) Data LKPP
**) Data APBN-P

- PDN = Pajak Dalam Negeri
- PPh = Pajak Penghasilan
- PPN = Pajak Pertambahan Nilai
- PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
- BPHTB = Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- PDI = Pajak Perdagangan Internasional

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di negeri kita Indonesia, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber terbesar penyumbang penerimaan negara yang di harapkan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak (WP) yang membayarnya. Pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Pajak dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat terdapat rencana dan realisasi penerimaan pajak *netto* yang berubah setiap tahunnya. Berikut penulis sajikan data rencana dan realisasi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat di tahun 2013-2015 pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Netto (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
2013	764.762,62	609.953,63	80%
2014	707.805,55	746.880,77	105%
2015	1.087.012,59	942.601,46	87%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak *netto* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat berfluktuasi dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Persentase terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu 105%, meningkat 25% dari tahun 2013, sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2014. Penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 salah satu penyebabnya adalah pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000 menjadi sebesar Rp36.000.000 untuk diri WP Orang Pribadi (OP).

Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Secara efektif PTKP tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak pada penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga berpotensi menurunkan penerimaan PPh OP.

Pajak merupakan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pajak harus diarahkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Penghasilan pajak juga digunakan untuk pembiayaan seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara dapat menikmati berbagai fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berusaha agar target bisa terpenuhi. Setiap tahunnya DJP menargetkan penambahan jumlah Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu, ekstensifikasi WP perlu diperhatikan khusus, karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara.

Kegiatan ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak masih memiliki legitimasi kuat sebagai upaya mendorong penerimaan pajak. Pemerintah sendiri dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 telah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.1.294,25 Triliun, tapi pemerintah hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp.1.005 Triliun. Jumlah tersebut mencapai 85% dari yang ditargetkan. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai lebih dari 100%.

Menurut Ariyanti dan Afriyadi (2016) bahwa :

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi di 2015 menjadi penyebab utama target penerimaan pajak 2015 sulit tercapai. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 mengalami perlambatan, hal ini berdampak terhadap penerimaan perpajakan terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Selain itu, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh melemahnya impor terkait dengan penurunan harga komoditas.”

Maka dari itu, KPP Pratama Ilir Barat ini tentunya melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan berdasarkan Surat Edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi WP adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi WP untuk menambah jumlah WP dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. Intensifikasi pajak ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan di KPP Pratama Iilir Barat yaitu kerjasama terhadap pihak instansi terkait untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan atau pertokoan dan lainnya. Kegiatan intensifikasi di KPP Pratama Iilir Barat pertama *mapping*, kegiatan ini merupakan pemetaan untuk melihat potensi pajak di wilayah kerja KPP. Kedua *profiling* WP, dimana kegiatan dilakukan dengan menggunakan profil WP dalam sistem DJP. Ketiga *benchmarking*, program pengawasan kewajiban perpajakan WP dan kegiatan lainnya. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Barat Tahun 2015.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diajukan penulis adalah:

1. Bagaimana analisis kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Iilir Barat dalam penerimaan pajak tahun 2015?
2. Bagaimana analisis kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Iilir Barat dalam penerimaan pajak tahun 2015?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar analisis menjadi lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang ada penulis membatasi pembahasan pada masalah yang menyangkut kegiatan ekstensifikasi berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2015 dan intensifikasi

berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam penerimaan pajak pada tahun 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan dilakukan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam penerimaan pajak pada tahun 2015.
2. Untuk mengevaluasi upaya intensifikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam penerimaan pajak pada tahun 2015.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulisan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah kemudian mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berkepentingan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam usaha penetapan kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dalam negeri.

3. Bagi Pemerintah atau Fiskus

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah atau fiskus dalam penetapan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:137), teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)
 - a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
 - b. Kuesioner (Angket)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
 - c. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
 - d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

Dalam laporan akhir ini, penulis memperoleh data dengan cara riset lapangan, yaitukuesioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan penulis juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang objektif. Berdasarkan sumber memperolehnya, Menurut Sanusi (2013:

104) sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Berdasarkan sumber-sumber data diatas, maka peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa formulir isian evaluasi kegiatan ekstensifikasi sesuai Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2015 dan intensifikasi berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 dan data sekunder menggunakan laporan penerimaan pajak *netto*, jumlah WP terdaftar dan efektif di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2013 sampai tahun 2015.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2012:206) , analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan kuisisioner, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis akan menjelaskan mengenai kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam penerimaan pajak selama tahun 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi Laporan Akhir ini serta memperlihatkan hubungan yang jelas antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai teori – teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah untuk mendukung penulisan laporan akhir ini sehingga dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi uraian-uraian mengenai sejarah singkat, visi misi dan motto, wilayah kerja, dan struktur organisasi maupun tugas-tugas setiap bagian dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil analisis data penelitian serta pembahasannya yang sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, selain itu penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para aparatur pajak (fiskus) dan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri, serta diharapkan dapat dijadikan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.